



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 729 /KPTA.W9-A/SK.OT1/IV/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2026
PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengusulan predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu adanya Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa penunjukkan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 360/SEK/PW1.1.1/II/2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2026.



Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 585/DJA/OT1.6/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Langkah Strategis Menuju WBK/WBBM Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas sebagai berikut :
1. Melakukan Penilaian dan Evaluasi pada aplikasi *pmpzi.mahkamahagung.go.id*;
 2. Melakukan Observasi langsung pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai jadwal ;
 3. Melaporkan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas tanggal 8 April 2026 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 NOMOR : 729/KPTA.W9-A/SK.OT1/IV/2026
 TANGGAL : 1 APRIL 2026

**PENUNJUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	Panitera	Koordinator Teknis
4.	Sekretaris	Sekretaris	Koordinator Operasional
TIM SUPERVISI			
1.	Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Dr. Drs. Muhiddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. Mahmud HD, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Dr. Drs. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
TIM PENILAI PERSYARATAN			
1.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Koordinator
2.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Yulita Fitri Hartaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
TIM PENILAI DOKUMEN			
1.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator
2.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	Anggota
3.	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
4.	Siti Fajriah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5.	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
6.	Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7.	Dewi Utari, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
8.	Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Dini Muthia Utami, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Intan Sulviyani, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Husni Afifah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	Andri Mardika, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	Winda Wulandari, A.Md.T.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

